
SURAKARTA: PERKEMBANGAN KOTA SEBAGAI AKIBAT PENGARUH PERUBAHAN SOSIAL PADA BEKAS IBUKOTA KERAJAAN DI JAWA

Surakarta: Urban Development as Effect of Social Changes in Ex-Capital City of Kingdom in Java

Suci Nur Aini Zaida

Mahasiswa Departemen Arsitektur Lanskap,
Fakultas Pertanian, IPB

Nurhayati H. S. Arifin

Staf Pengajar Departemen Arsitektur Lanskap,
Fakultas Pertanian, IPB
e-mail : nurarif@ipb.ac.id

ABSTRACT

The aim of this study was to describe the relation of urban landscape development that influenced by social change. This study was focused on the changing occur before the Kingdom of Surakarta until reformation period. The analysis was intended to find out the main factors that had been influencing the urban landscape development and also to formulate the concept of urban planning in the future based on its history and the social character.

Surakarta, otherwise Solo or Salay, was the capital city of Surakarta Hadiningrat's Kingdom. Founded in 1745, it was built on a magical rather than a rational consideration. It's located in the crosscurrent of two rivers, the Bengawan Solo and the Pepe. According to the Javanese cosmology, the inner city comprised of the kraton complex called Baluwarti and the alun-alun (palace square), all located inside the beteng (palace wall). Outside the palace wall were houses of the sentana (nobility), the abdi dalem (retainers) and the commonners. The coming of the Europeans, the Chinese and the Arabs formerly did not alter the cosmology concept of the city. In the beginning of the twentieth century, due to the advance of technology and the expansion of business, service and leisure, the city was changed. It was in development period that the most change towards a modern city took place. The skeleton of the city remained the same, but the environment became entirely different.

Keywords: *Surakarta, Javanese cosmology, urban landscape development, social change, urban planning.*

PENDAHULUAN

Suatu lanskap secara umum terbentuk dari hasil proses interaksi kondisi dan proses alam dengan manusia yang ada didalamnya dalam kurun waktu yang panjang. Lanskap yang dibangun manusia dalam suatu periode sejarah dapat merefleksikan kebudayaan, ekonomi dan "political nature" suatu masyarakat yang dengan mempelajarinya dapat lebih memahami manusia yang ada sekarang serta bagaimana mereka mengekspresikan dirinya dalam pembangunan lanskapnya (Carpenter *et.al.*, 1975).

Selama dua abad (1745-1945), Kota Surakarta tumbuh sebagai ibukota kerajaan Jawa. Meski dalam kurun waktu tersebut secara politik kekuasaan raja banyak dicampuri oleh pemerintah Hindia Belanda, namun struktur sosial di Surakarta masih mencerminkan susunan masyarakat Jawa dengan segala tata kehidupannya. Perubahan sosial yang terjadi akibat pergantian penguasa di Kota Surakarta, juga tercermin pada perkembangan fisik kota. Perkembangan akhir-akhir ini me-

ncenderung perubahan orientasi menuju perencanaan yang menghasilkan keseragaman dan menghilangkan karakteristik asalnya.

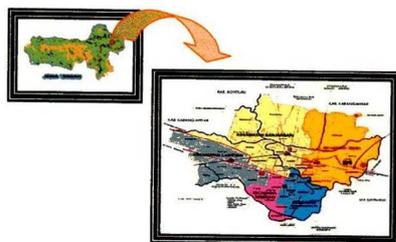
Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah perkembangan lanskap Kota Surakarta dari masa prake-rajaaan hingga sekarang, mengidentifikasi karakter lanskap Kota Surakarta pada masing-masing periode, mengidentifikasi lanskap sejarah yang ada pada saat ini serta menghasilkan rekomendasi dalam perencanaan dan penataan kota.

Kegunaan yang diperoleh dari studi ini adalah dapat memberikan informasi tentang perkembangan lanskap Kota Surakarta, mendeskripsikan mengenai pola, proses dan dampak perubahan sosial yang menyangkut perkembangan tata ruang kota, memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan kota dalam upaya penataan kota serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah setempat dalam mengembangkan Kota Surakarta dan sekitarnya yang mengakomodasi kondisi sosial masyarakat.

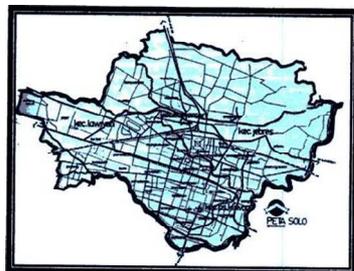
METODOLOGI

Studi mengenai perkembangan kota ini dilakukan di kawasan Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pelaksanaan studi ini dimulai pada bulan Februari 2004 sampai dengan bulan Juni 2004. Peta Lokasi terdapat pada Gambar 1. dan Gambar 2. menyatakan peta kota Surakarta saat ini.

Metode studi ini bersifat kualitatif, yaitu mempelajari perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Kota Surakarta dan kemudian mencari kaitannya pada perkembangan tata ruang kota. Strategi dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi mengenai kesejarahhan. Data yang dikumpulkan berbentuk naskah, angka, gambar dan peta. Analisis dilakukan terhadap kondisi sosial masyarakat Kota Surakarta yang dapat menghasilkan informasi mengenai struktur sosial masyarakat Kota Surakarta pada masing-masing periode. Selanjutnya dianalisis mengenai



Gambar 1. Peta Lokasi Studi



Gambar 2. Peta Kota Surakarta Sekarang

perkembangan tata ruang kota dengan menganalisis peta-peta yang diperoleh dan dibandingkan antara beberapa periode untuk mengetahui perkembangannya. Hasil analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi karakter lanskap pada masing-masing periode. Dari kedua analisis tersebut kemudian *dioverlay* sehingga diperoleh sebuah gambaran mengenai perubahan sosial yang berdampak pada perkembangan tata ruang kota.

Hasil dari identifikasi karakter lanskap akan di *cross check* dengan kondisi lanskap Kota Surakarta saat ini untuk melihat kondisi lanskap masa lalu yang ada saat ini. Selanjutnya hasil analisis dari perkembangan lanskap Kota Surakarta, peraturan dan kebijakan terkait serta kondisi lanskap dan masyarakat Kota Surakarta disintesis untuk mendapatkan konsep penataan kota yang mampu mengakomodasi dinamika warga kotanya.

Dengan demikian produk akhir dari studi ini adalah berupa deskripsi mengenai perkembangan lanskap Kota Surakarta berdasarkan perubahan kondisi sosial dari periode ke periode serta usulan konsep integrasi lanskap sejarah dalam perencanaan kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedaaan Umum Kota Surakarta

Kondisi Geografis Kota Surakarta

Kota Surakarta dianggap sebagai pusat kebudayaan Jawa, selain Yogya-

karta, terletak antara 110° BT -111° BT dan 7,6° LS-8° LS termasuk kota di pedalaman Propinsi Jawa Tengah pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo. Batas-batas Kota Surakarta adalah barat dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Karanganyar, dan batas sebelah timur adalah Sungai Bengawan Solo. Kota Surakarta merupakan kota nomor 2 di Jawa Tengah setelah Kota Semarang sebagai ibukota propinsi dan terletak 102 km dari Kota Semarang ke arah selatan. Kota Surakarta dengan luas 44,04 km² dan berpenduduk 554,630 jiwa, merupakan pusat pembangunan Jawa Tengah bagian Selatan dan Tenggara.

Arti Kata "Sala"

Secara historis tentang arti istilah "Sala" telah terdapat pada buku-buku kuno, yaitu :

1. Babad Sengkala Ageng (KPH Hadiwijaya, 1962:32), menulis dengan bersumber pada hasil karya Sultan Hamengku Buwono I pada tahun 1751 yang menyebutkan antara lain perpindahan kraton dari Kartasura ke Desa Sala. Selain itu juga menceritakan pulangnya Pangeran Mangkubumi dari Sukawati (sekarang Kota Sragen) setelah berperang melawan Adipati Martapura dari Grobogan. Dalam kutipan tersebut dikatakan bahwa di Kampung Baturana banyak sekali terdapat "Pohon Sala".
2. Serat Mahabarata (RNg. Jayapuspita, 1911: 112;138) menyebutkan sebagai berikut : *Ingang warnipun cemeng, dedeg pangadegipun kados wit "Sala", blalak-blalak paningalipun, apanjang ingkang grana, ingkang makaten rupinipun punika ingkang jejuluk Yudhistira...* Kutipan tersebut menggambarkan wujud Prabu Yudhistira dari keluarga Pandawa, tinggi besar seperti "Pohon Sala". Dari kedua kutipan diatas, jelas bahwa "Sala" adalah nama sejenis pohon.
3. Didalam kamus Mac Donell (1924: 312) dijelaskan bahwa gala ditemukan dalam bahasa Latin namanya *Vatica Robusta*, dan dalam bahasa Sansekerta disebut

Cala. Penjelasan lanjut tentang pohon Sala dapat dilihat pada tulisan William Rosbergh (1755-1819) mengenai ciri-ciri pohon Sala antara lain kayunya lurus, tebal, tingginya bisa mencapai 30 kaki, berdaun halus dan berwarna hijau muda serta berbentuk bulat. Bunganya banyak, berwarna kuning dan berbentuk malai, biji tunggal berbentuk bulat telur sebesar biji kacang tanah. Banyak tumbuh di daerah India yaitu di Calcutta dan Morung. Nama lain dari Sala adalah Sal (Bombay), Shalam (Tamil), Salwa (Urija).

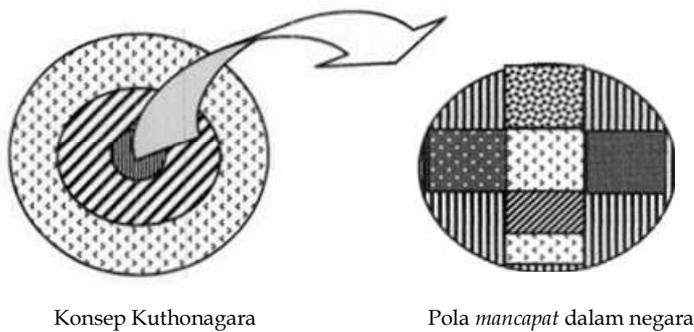
Di Indonesia tidak tumbuh pohon "Sala", yang ada adalah pohon "Salam" yang daunnya dapat digunakan untuk penyedap masakan. Lagi pula bekas-bekas pohon Sala di Kota Sala tidak ada. Maka kemungkinan besar yang dimaksud dengan pohon Sala adalah pohon Salam tersebut, karena ciri-ciri pohon Sala hampir sama dengan pohon Salam dan diperkirakan di Desa Sala dahulu banyak terdapat pohon Salam.

Perkembangan Lanskap Kota Surakarta

Masa Pra-Pemerintahan Kasunanan Surakarta

Bentuk awal kota merupakan lingkungan sosial yang sangat sederhana pada saat masih berupa *Dusun* atau Desa Sala dengan ciri masyarakat *murni agraris tradisional*. Dengan karakter lahan di Desa Sala yang subur karena banyak dilalui oleh sungai-sungai dan banyak terdapat rawa, maka dapat disimpulkan bahwa pertanian di Desa Sala telah berkembang. Pola penggunaan lahan di Desa Sala lebih dominan diperuntukkan sebagai lahan pertanian. Kemajuan perekonomian di Desa Sala selain karena aktivitas pertanian juga karena adanya dua bandar perdagangan besar, yaitu Pelabuhan Beton dan Bandar Nusupan.

Secara sosial budaya, masyarakat Desa Sala masih merupakan masyarakat tradisional Jawa dengan nilai-nilai serta kepercayaan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Desa Sala dipimpin oleh seorang bekel yang bernama Ki Gede Sala (Sajid, 1984). Ki Gede Sala dianggap sebagai titik pusat keseimbangan antara hal-



Konsep Kuthonagara Pola *mancapat* dalam negara
 Gambar 3. Penerapan pola *mancapat* dalam konsep Khuthonagara

hal yang nyata, empirik ataupun duniawi. Hal tersebut didasarkan pada budaya Jawa yang dipengaruhi oleh budaya Hindu-Budha, bahwa seorang pemimpin dianggap sebagai titisan Dewa dan kepemimpinannya bersifat turun-temurun. Dalam penataan dan pengaturan desa, konsep yang diterapkan adalah konsep kosmologi dengan pola *mancapat*, dimana sebagai titik pusat adalah tempat tinggal Ki Gede Sala, di sebelah timur terdapat pasar sebagai lambang duniawi dan di sebelah barat rumah Ki Gede Sala terdapat suatu jalan yang lurus yang mengacu pada Gunung Merapi sebagai simbol akhirat. Sumbu utara-selatan juga terlihat sangat kuat berpengaruh karena terdapat sebuah jalan yang jika ditarik searah utara-selatan merupakan garis tengah kediaman Ki Gede Sala. Dijabarkan pada Gambar 3.

Selain itu, di dalam masyarakat belum terdapat klasifikasi atau dapat dikatakan struktur sosial masyarakatnya masih homogen. Struktur sosial yang masih homogen ini juga mempengaruhi rona arsitektur tradisional Desa Sala yang masih sederhana dan tidak bervariasi.

Masa Pemerintahan Kasunanan Surakarta Hadiningrat

Struktur sosial masyarakat Desa Sala mengalami pergeseran pada saat daerah ini dijadikan lokasi baru Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai ibukota kerajaan Jawa. Mulai saat itu terbentuklah lingkungan masyarakat yang berorientasi ke arah bentuk sosial budaya kraton yang mengenal stratifikasi sosial di dalamnya.

Meskipun terjadi perubahan yang signifikan pada struktur sosial ma-

sarakat di Kerajaan Surakarta, namun pola dan bentuk tata ruang kota hanya sedikit mengalami pergeseran. Konsep penataan dan pengaturan kota tetap berdasarkan konsep kosmologi kejawaan dengan pola *mancapat*. Sebagai titik pusat adalah alun-alun sebelah utara, dimana alun-alun ini merupakan bekas rumah Ki Gede Sala. Di sebelah barat dari alun-alun ini terdapat masjid agung sebagai lambang dimensi duniawi. Sumbu utara-selatan masih tetap dipertahankan. Sebagai penghormatan terhadap Laut Selatan maka di sebelah selatan dari alun-alun adalah rumah tinggal raja, dimana dalam kepercayaan Jawa penguasa Laut Selatan merupakan salah satu istri raja secara turun-temurun. Sedangkan di sebelah utara alun-alun terdapat pusat pemerintahan yang lebih dikenal dengan Kepatihan.

Selain menggunakan pola *mancapat* dalam penataan dan pengaturan kota, diterapkan pula konsep penataan kota yang lain yaitu konsep *kuthonagara* (Roffaer, 1931). Konsep *kuthonagara* ini membagi kerajaan menjadi tiga wilayah administratif. *Pertama*, wilayah *negara* yang merupakan pusat pemerintahan kerajaan. Wilayah ini dihuni oleh kurang lebih 10.000 orang dimana hampir seluruhnya adalah keluarga raja dan sentana. Wilayah ini meliputi hampir seluruh wilayah kota Surakarta. *Kedua*, wilayah *negara agung (negara-gung)* dimana terdapat tanah-tanah lungguh atau *apanage* milik para bangsawan istana yang diwajibkan untuk menyerahkan dua perlima dari hasil pertanian tanah-tanah mereka dan menyerahkan sejumlah tenaga wajib kepada kraton. *Ketiga*, wilayah *mancanegara* atau daerah-daerah luar yang berada dibawah ke-

kuasaan sejumlah bupati yang dikenai pajak (*siti majengan*).

Pola dan bentuk kota yang terjadi cenderung linier atau konstelasi (*constellation*) sederhana. Jalur-jalur sirkulasi dan pemukiman masih sangat sederhana dan belum teratur. Pusat orientasi dan aktivitas kota yang utama terdapat pada kompleks kraton, alun-alun dan bangunan keagamaan. Konsep *kuthonagara* juga mempengaruhi pembagian daerah peruntukan di Kota Surakarta pada masa Kerajaan, yaitu pusat kota yang terdiri pemukiman, pemerintahan serta perniagaan dan luar kota yang terdiri dari pertanian dan pertahanan.

Setelah akses melalui darat dibuka dengan adanya pembangunan jalan, maka sungai Bengawan Solo yang merupakan penghubung antara Jawa Timur dan Jawa Tengah jarang dipergunakan lagi. Hal tersebut mengakibatkan dua bandar perdagangan pada masa pra-Kerajaan mulai ditinggalkan.

Masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda

Campur tangan dan intervensi dari VOC tidak hanya sebatas perdagangan namun mulai memasuki wilayah politik kerajaan. Pada tahun 1800 dibentuklah pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Hal tersebut mempengaruhi struktur sosial yang terbentuk dalam masyarakat Surakarta. Klasifikasi dalam masyarakat mengalami pergeseran, etnis Asia pendatang menjadi lebih tinggi daripada pribumi karena dukungan penjajah. Kelompok ini mendominasi bidang ekonomi perdagangan kota. Yang menempati struktur tertinggi dalam masyarakat bukan lagi golongan raja dan bangsawan namun pemerintah Belanda. Pengaruh etnis pendatang tersebut makin lama makin kuat mempengaruhi kehidupan masyarakat kota, menyangkut aspek gaya hidup, bahasa, seni, dan perilaku sosial. Namun demikian, kharisma kraton masih dihormati dalam kehidupan yang semakin kompleks tersebut.

Kondisi diatas membuat tata ruang kota Surakarta mengalami pergeseran pula. Pola jalur sirkulasi linier berkembang menjadi kotak-kotak (*grid* atau *rectilinier*). Pola dan bentuk

kota dengan garis-garis tegas diterapkan oleh pemerintah Belanda dalam merencanakan Kota Surakarta, mengingat kondisi topografi kota yang relatif datar dan untuk memudahkan pembagian daerah peruntukan atau penggunaan lahan. Pembagian penggunaan lahan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda adalah pusat kota yang terdiri pemerintahan, industri, perniagaan, pertahanan serta luar kota yang terdiri pertanian, pemukiman dan industri. Pusat orientasi dan aktivitas kota yang penting adalah lingkungan kraton, Benteng *Vastenberg* dan Gubernuran. Pada periode ini pemukiman masyarakat lokal tergeser ke luar kota dan dipusat kota hanya ada pemukiman bangsa Eropa dan Timur Asing serta Kerajaan. Hal tersebut disebabkan kebijakan kepentingan dari Belanda untuk menduduki pusat-pusat kota sehingga intervensi terhadap pemerintah Kerajaan dapat dilakukan dengan mudah.

Uraian di atas menggambarkan bahwa dengan adanya pembentukan birokrasi kolonial yang kemudian berpengaruh terhadap bentuk administrasi kolonial, pada masa pemerintahan Paku Buwono X (antara tahun 1893-1939) terjadi perubahan wajah kota dari kota homogen menjadi kota heterogen. Perkembangan kota Surakarta pada masa ini, dapat dikatakan mengacu pada dua tipe perkembangan kota, yaitu kota kosmologi dan kota ekologi (Kuntowijoyo, 2000). Perkembangan menjadi kota kosmologi akan berpengaruh terhadap perubahan struktur sosial, misalnya differensiasi komunitas sosial, eksklusifisme sosial, dan proletarisasi. Sedangkan perkembangan menjadi kota ekologi berpengaruh terhadap perubahan struktur ruang kota seperti pembangunan infrastruktur ekonomi, pembangunan infrastruktur budaya, perkembangan transportasi kota, *urban development*, dan reorganisasi agraria kota.

Masa Kemerdekaan Republik Indonesia (1945 -1965)

Proses kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan yang sangat panjang. Perubahan sosial di Surakarta pada masa ini mulai terjadi ketika pada tahun 1920-an terpelajar yang umum-

nya berasal dari kalangan bangsawan mendirikan organisasi yang berorientasi pada gerakan kebangsaan. Perubahan lebih radikal terjadi pada masa pendudukan Jepang (1942) dan mencapai puncaknya ketika Indonesia menyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, yang berakibat hilangnya kekuasaan politik Kraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran (Pringgokusumo, 1983).

Bagi Kota Surakarta, kemerdekaan berarti penghancuran terhadap tata nilai dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat. Periode ini merupakan titik awal dari perubahan tata ruang kota Surakarta saat ini. Dengan adanya gerakan antismawraja yang berakhir dengan tidak diperolehnya status "daerah istimewa" bagi Kota Surakarta, sehingga kekuasaan Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran hanya mencakup wilayah spiritual dan hanya meliputi kaum kerabatnya sendiri.

Struktur sosial yang ada pada era ini, heterogenitas dalam masyarakat warisan kolonial masih terlihat tetapi klasifikasi dan stratifikasi mulai melemah. Hal ini terjadi karena timbulnya kebangkitan rasa nasionalisme dan kebangsaan yang makin kuat, sehingga masyarakat menghormati persamaan dan kesederajatan hak serta kewajiban dalam negara merdeka.

Pada periode ini Pemerintah Indonesia menetapkan peraturan dalam hal pertanahan (agraria), yang dikenal dengan *Land Reform* dalam bentuk Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa lahan-lahan dan tanah-tanah perkebunan milik Belanda dikembalikan kepada rakyat Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masa Pemerintahan Orde Baru (1966-1998)

Dengan berakhirnya kekuasaan di Kota surakarta, maka roda pemerintah sepenuhnya berada ditangan Pemerintah Daerah Tingkat II Surakarta yang dipimpin oleh seorang walikota. Perubahan-perubahan besar terjadi diseluruh aspek kehidupan, mulai dari sistem pemerintahan dan politik, sistem perekonomian,

sistem pertahanan keamanan serta kondisi sosial-budaya. Pada periode ini ditandai dengan semakin luasnya pengaruh luar masuk ke Indonesia sebagai akibat semakin banyaknya hubungan dengan dunia luar. Pembangunan kota diarahkan pada modernisasi. Gejala tersebut ditandai dengan munculnya bangunan-bangunan modern yang sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Namun, kondisi sosial budaya masyarakat belum siap menerima dengan baik pengaruh asing tersebut sehingga sering terjadi *anomi* dan *alienasi* terhadap suatu produk fisik. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Surakarta ini telah berpengaruh terhadap perkembangan kota secara menyeluruh. Pola pemukiman maupun pusat-pusat kegiatan tidak lagi mengikuti struktur yang ada, melainkan berorientasi kepada pasar dan membentuk pola baru yang ditumpangkan pada struktur kota lama. Kampung-kampung asli telah terkurung oleh bangunan-bangunan modern yang bentuk dan gayanya tercerabut dari lingkungan fisik warisan budaya setempat.

Pada masa inilah peran kapitalisme sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan kota. Kota Surakarta mengalami komersialisasi besar-besaran. Akselerasi ekonomi terasa berdampak besar pada wajah kota ini. Banyak bangunan modern yang megah dan tinggi dibangun di luar proporsi dan fokus, sehingga memunculkan ketidakseimbangan antara bangunan tradisi dan bangunan baru. Bangunan Bank BCA misalnya, secara semena-mena *mledhingi* (memantati) situs Keraton Surakarta. Selain itu, keberadaan Tugu Adipura yang diolok-olok sebagai "Tugu Setan", terletak di depan Gapura Gladak, sebagai lambang arogansi penguasa. Tugu megah setinggi 15 meter tersebut dianggap secara semena-mena menginjak wilayah batin warga dan merusak keselarasan arsitektur lingkungan. Kebijakan sentralisasi oleh Pemerintah RI menyebabkan pola pembangunan kota di Indonesia umumnya menginduk pada pembangunan di Jakarta. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya kontrasitas sosial (benturan sosial akibat kondisi yang berbeda) yang

menyebabkan Kota Surakarta rentan terhadap konflik sosial.

Secara fisik, perkembangan Kota Surakarta selanjutnya menunjukkan pola dan bentuk *grid* pada masa kolonial masih dipertahankan pada periode ini. Di daerah pinggiran kota, pola *grid* yang ada kurang tegas dan kurang teratur. Hal ini disebabkan perkembangan kota yang cenderung spontan dan kurang terencana. Perpaduan antara bentuk kota masa kerajaan dan masa kolonial dapat dirasakan dan diamati pada periode ini. Kraton Kasunanan dan Mangkunegaran masih menjadi pusat aktivitas dan orientasi lingkungan lain, namun daerah pusat aktivitas kota cenderung bertambah banyak dan menyebar mengikuti arah perkembangan penduduk. Selain itu pola peruntukan wilayah juga mengalami perubahan. Pada periode ini pemerintah hanya terfokus pada pembangunan yang bersifat kapitalistik dan komersial, sehingga lahan-lahan pertanian yang berada di luar kota mulai berubah menjadi kawasan industri. Di pusat kota mulai tumbuh pemukiman-pemukiman baru.

Bangunan-bangunan penting yang dibangun pada periode-periode sebelumnya tidak diperhatikan lagi. Bahkan kondisinya terlihat memprihatinkan (Bappeda, 1995). Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam perencanaan kota tidak memperhatikan nilai-nilai kesejarahan dari bangunan-bangunan tersebut, sehingga sebagian besar masyarakat (pendatang) tidak mengetahui arti penting dari bangunan-bangunan tersebut.

Masa Reformasi (1999-sekarang)

Tekanan arus urbanisasi yang melonjak mengakibatkan pengaturan tata ruang kota yang dapat melahirkan konflik spasial namun tidak jarang juga memicu terjadinya konflik fisik. Seluruh kepentingan untuk memanfaatkan tata guna tanah saling beradu kuat untuk merebut akses dan dalam konteks ini biasanya tidak ada satu pihak pun yang mau mengalah. "Musibah" pada tahun 1998 dan 1999 tersebut membangkitkan kesadaran warga Kota Surakarta untuk ikut "menentukan" garis

dan arah pembangunan kota di masa mendatang. Kehancuran Kota Surakarta justru bisa menjadi *starting point* (titik awal) untuk membangun Kota Surakarta yang lebih baik dan tertata serta dapat mengakomodasi aspirasi rakyat.

Dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi dimana daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat melalui prakarsanya sendiri (UU No. 22 Tahun 1999), Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan visi yaitu "Terwujudnya Kota Surakarta sebagai Kota Budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa dan pendidikan, pariwisata dan olahraga". Berdasarkan visi tersebut, maka perkembangan Kota Surakarta diharapkan dapat menemukan kembali identitas atau karakter yang dimiliki dan melekat dalam kehidupan masyarakat selama dua abad, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang termarginalkan.

Analisis Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Perkembangan Lanskap Kota Surakarta

Perubahan Struktur Sosial Masyarakat Kota Surakarta

Bentuk awal kota merupakan lingkungan sosial yang sangat sederhana dengan ciri masyarakat *agraris tradisional*. Masyarakat Desa Sala masih merupakan masyarakat tradisional Jawa dengan nilai-nilai serta kepercayaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Desa Sala dipimpin oleh seorang bekel yang bernama Ki Gede Sala. Tugas seorang bekel adalah bertanggung jawab atas baik buruknya pelaksanaan tugas di desa-desa (Radjiman, 1984). Dalam kedudukannya sebagai seorang pemimpin, Ki Gede Sala dianggap sebagai titik pusat keseimbangan antara hal-hal yang nyata, empirik ataupun

gaib/aduniawi. Hal tersebut didasarkan pada kepercayaan serta budaya Jawa yang masih dipengaruhi oleh budaya Hindu-Budha, bahwa seorang pemimpin dianggap sebagai titisan dari Dewa dan kepemimpinannya bersifat turun-temurun. Di dalam masyarakat belum terdapat klasifikasi atau dapat dikatakan struktur sosial masyarakatnya masih homogen.

Struktur sosial masyarakat Desa Sala mengalami pergeseran pada saat daerah ini dijadikan lokasi baru Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai ibukota kerajaan Jawa. Mulai saat itu terbentuklah lingkungan masyarakat yang berorientasi ke arah bentuk sosial budaya kraton yang mengenal klasifikasi sosial didalamnya. Di dalam struktur sosial masyarakat ini, terdapat golongan raja dan kerabatnya, bangsawan, priyayi ngaluhur, abdi dalem dan rakyat biasa yang terklasifikasi secara hirarkikal dan sangat kecil kemungkinan terjadi mobilitas sosial secara vertikal.

Namun, sejak kedatangannya pada tahun 1800, pengaruh dan campur tangan pemerintah kolonial sangat berdampak besar dalam membawa perubahan dalam kerajaan bahkan kekuasaan raja sebagai pemimpin harus tunduk di bawah Pemerintah Kolonial Belanda. Hal tersebut mempengaruhi struktur sosial yang terbentuk dalam masyarakat Surakarta. Klasifikasi dalam masyarakat mengalami pergeseran, etnis Asia pendatang menjadi lebih tinggi dari pada pribumi karena dukungan penjajah. Kelompok ini mendominasi bidang ekonomi dan perdagangan. Pengaruh etnis pendatang tersebut makin lama makin kuat mempengaruhi kehidupan masyarakat kota, menyangkut aspek gaya hidup, bahasa, seni, dan perilaku sosial. Namun demikian, kharisma kraton masih dihori-

Tabel 1. Perubahan Struktur Sosial Masyarakat Kota Surakarta

| No | Periode | Klasifikasi Sosial | Penguasa |
|----|---------------------------------|--|-----------------------------|
| 1. | Pra-Kerajaan | Tidak ada klasifikasi sosial (homogen) | Bekel |
| 2. | Kasunanan Surakarta Hadiningrat | Pemimpin (Raja), Bangsawan, Abdidalem, Rakyat (secara hirarkikal) | Raja |
| 3. | Pemerintah Kolonial Belanda | Bangsa Belanda, Raja dan kerabatnya, bangsa Timur asing (Cina, Arab, India), Pribumi (secara hirarkikal) | Pemerintah Kolonial Belanda |
| 4. | Kemerdekaan RI (1945-1965) | Heterogen, klasifikasi sosial mudah melemah | Pemerintah RI (walikota) |
| 5. | Orde Baru (1966-1998) | Tidak ada klasifikasi sosial secara hirarkikal namun terdapat klasifikasi sosial secara horizontal | Pemerintah RI (walikota) |
| 6. | Reformasi (1999-sekarang) | Tidak ada klasifikasi sosial (heterogen) | Pemerintah RI (walikota) |

mati dalam kehidupan yang semakin kompleks tersebut.

Struktur sosial yang ada pasca kemerdekaan adalah heterogenitas dalam masyarakat warisan kolonial masih terlihat, tetapi klasifikasi mulai melemah. Hal ini terjadi karena timbulnya kebangkitan rasa nasionalisme dan kebangsaan yang makin kuat, sehingga masyarakat menghormati persamaan dan kesederajatan hak serta kewajiban dalam negara merdeka. Klasifikasi sosial yang ada hingga saat ini adalah pribumi dan pendatang.

Secara ringkas hasil analisis perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Kota Surakarta dapat dilihat pada Tabel 1.

Pengaruh Perubahan Struktur Sosial Terhadap Lanskap Kota Surakarta

Lanskap suatu kota pada dasarnya merupakan hasil dari keinginan manusia yang membentuknya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perubahan struktur sosial masyarakat Kota Surakarta sangat berpengaruh terhadap berubahnya bentuk Lanskap kota. Perubahan lanskap kota dapat tercermin dalam perubahan konsep penataan ruang kota, penggunaan lahan (*landuse*) serta bangunan-bangunan fisik dari masing-masing periode perkembangan.

Pada periode pra kerajaan, dalam penataan dan pengaturan desa, konsep yang diterapkan adalah konsep kosmologi dengan pola *mancapat*, dimana sebagai titik pusat adalah tempat tinggal Ki Gede Sala. Di sebelah timur terdapat pasar sebagai lambang duniawi dan di sebelah barat rumah Ki Gede Sala terdapat suatu jalan yang lurus yang mengacu pada Gunung Merapi sebagai simbol akhirat. Sumbu utara-selatan juga terlihat sangat kuat berpengaruh karena terdapat sebuah jalan yang jika ditarik searah utara-selatan merupakan garis tengah kediaman Ki Gede Sala.

Meskipun terjadi perubahan yang signifikan pada struktur sosial masyarakat di Kerajaan Surakarta, namun pola dan bentuk tata ruang kota hanya sedikit mengalami pergeseran. Konsep penataan dan pengaturan kota tetap berdasarkan atas konsep kosmologi *kejawen* dengan pola *man-*

capat seperti pada Desa Sala namun dalam skala yang lebih luas yaitu ibukota kerajaan. Sebagai titik pusat dari konsep penataan ini merupakan bekas rumah Ki Gede Sala. Selain menggunakan pola *mancapat* dalam penataan dan pengaturan kota, diterapkan pula konsep penataan kota yang lain yaitu konsep *kuthonagara*. Konsep *kuthonagara* ini membagi kerajaan menjadi tiga wilayah administratif yaitu *pertama*, wilayah negara yang merupakan pusat pemerintahan kerajaan. Wilayah ini dihuni oleh kurang lebih 10.000 orang dimana hampir seluruhnya adalah keluarga raja dan sentana. Wilayah ini meliputi hampir seluruh wilayah kota Surakarta. *Kedua*, wilayah negara agung (negaragung) dimana terdapat tanah-tanah lungguh atau *apanage* milik para bangsawan istana yang diwajibkan untuk menyerahkan dua perlima dari hasil pertanian tanah-tanah mereka dan menyerahkan sejumlah tenaga wajib kepada kraton. *Ketiga*, wilayah mancanegara atau daerah-daerah luar yang berada dibawah kekuasaan sejumlah bupati. Tidak ada tanah *apanage*, yang ada hanya tanah yang dikenai pajak (*siti majengan*). Penataan dan pengaturan kota berdasarkan pola *mancapat* dalam konsep *kuthonagara* ini diterapkan pada lingkungan negara yang juga merupakan tempat tinggal raja, bangsawan, sentana dalem dan abdi dalem.

Pola dan bentuk kota yang terjadi cenderung linier atau konstelasi (*constellation*) sederhana. Jalur-jalur sirkulasi dan pemukiman masih sangat sederhana dan belum teratur. Kesan teratur hanya dapat dijumpai di lingkungan kraton, yaitu kraton, alun-alun dan masjid. Pusat orientasi dan aktivitas kota yang utama terdapat pada kompleks kraton, alun-alun dan bangunan keagamaan. Konsep Kuthonagara juga mempengaruhi pembagian daerah peruntukan di Kota Surakarta pada masa Kerajaan yaitu pusat kota yang terdiri pemukiman, pemerintahan serta perniagaan dan luar kota yang terdiri dari pertanian dan pertahanan.

Kondisi diatas membuat tata ruang kota Surakarta mengalami pergeseran pula. Pola jalur sirkulasi linier berkembang menjadi kotak-kotak (*grid* atau *rectiliniar*). Pola dan bentuk

kota dengan garis-garis tegas diterapkan oleh pemerintah Belanda dalam merencanakan Kota Surakarta, mengingat kondisi topografi kota yang relatif datar dan untuk memudahkan pembagian daerah peruntukan atau penggunaan lahan. Pembagian penggunaan lahan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda adalah pusat kota yang terdiri pemerintahan, industri, perniagaan, pertahanan serta luar kota yang terdiri pertanian, pemukiman dan industri. Pusat orientasi dan aktivitas kota yang penting adalah lingkungan kraton, Benteng *Vastenberg* dan Gubernuran. Pada periode ini pemukiman masyarakat lokal tergeser ke luar kota dan dipusat kota hanya ada pemukiman bangsa Eropa dan Timur Asing serta Kerajaan. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan dan kepentingan dari Belanda untuk dapat menduduki pusat-pusat kota sehingga intervensi terhadap pemerintah Kerajaan dapat dilakukan dengan mudah.

Uraian di atas menggambarkan bahwa dengan adanya pembentukan birokrasi kolonial yang kemudian berpengaruh terhadap bentuk administrasi kolonial, pada masa pemerintahan Paku Buwono X yaitu antara tahun 1893-1939, maka terjadi perubahan wajah kota dari kota homogen menjadi kota heterogen. Perkembangan kota Surakarta pada masa ini, dapat dikatakan mengacu pada dua tipe perkembangan kota, yaitu kota kosmologi dan kota ekologi. Perkembangan menjadi kota kosmologi akan berpengaruh terhadap perubahan struktur sosial, misalnya differensiasi komunitas sosial, eksklusifisme sosial, dan proletarisasi. Sedangkan perkembangan menjadi kota ekologi berpengaruh terhadap perubahan struktur ruang kota seperti pembangunan infrastruktur ekonomi, pembangunan infrastruktur budaya, perkembangan transportasi kota, *urban development*, dan reorganisasi agraria kota. Selain itu, terjadi fenomena yang menggambarkan infiltrasi aspek arsitektur barat dan asing lainnya dalam arsitektur tradisional Jawa di Surakarta yang dapat dilihat di seluruh bagian kota, bahkan bangunan di dalam kraton tidak luput dari proses ini. Kondisi tersebut akhirnya membentuk rona

atau wajah kota sebagai kota campuran.

Bagi Kota Surakarta kemerdekaan berarti penghancuran terhadap terhadap tata nilai dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat yang berdampak pada tata ruang kota. Periode ini merupakan titik awal dari perubahan tata ruang kota Surakarta saat ini. Dengan adanya gerakan antisuapraja yang berakhir dengan tidak diperolehnya status "daerah istimewa" bagi Kota Surakarta, sehingga kekuasaan Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran hanya mencakup wilayah spiritual dan hanya meliputi kaum kerabatnya sendiri.

Dengan berakhirnya kekuasaan kerajaan di Kota Surakarta, maka roda pemerintahan sepenuhnya berada ditangan Pemerintah Daerah Tingkat II Surakarta yang dipimpin oleh se-orang walikota. Perubahan-perubahan besar terjadi diseluruh aspek kehidupan, mulai dari sistem pemerintahan dan politik, sistem perekonomian, sistem pertahanan keamanan serta kondisi sosial-budaya. Pada masa atau periode ini ditandai dengan semakin luasnya pengaruh luar masuk ke Indonesia sebagai akibat semakin bebasnya hubungan dengan dunia luar. Pembangunan kota diarahkan kepada modernisasi. Gejala tersebut ditandai dengan munculnya bangunan-bangunan modern yang sangat kontras dengan lingkungan disekitarnya. Namun, kondisi sosial budaya masyarakat belum siap menerima dengan baik pengaruh asing tersebut, sehingga sering terjadi *anomi* dan *alienasi* (keterasingan) terhadap suatu produk fisik. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Surakarta ini telah berpengaruh terhadap perkembangan kota secara menyeluruh. Pola pemukiman maupun pusat-pusat kegiatan tidak lagi mengikuti struktur yang ada, melainkan berorientasi kepada pasar dan membentuk pola baru yang ditumpangkan pada struktur kota lama. Kampung-kampung asli telah terkurung oleh bangunan-bangunan modern yang bentuk dan gayanya tercabut dari lingkungan fisik warisan budaya setempat.

Pada masa inilah peran kapitalisme atau para pemilik modal, sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan kota. Kota Surakarta telah mengalami komersialisasi besar-besaran. Akselerasi ekonomi terasa berdampak besar pada wajah kota ini. Banyak bangunan modern yang megah dan tinggi dibangun di luar proporsi dan fokus, sehingga memunculkan ketidakseimbangan antara bangunan tradisi dan bangunan baru. Bangunan Bank BCA, misalnya, secara semena-mena *mledhingi* (memantati) situs Keraton Surakarta. Selain itu, keberadaan Tugu Adipura yang diolok-olok sebagai "Tugu Setan", terletak di depan Gapura Gladak, sebagai lambang arogansi penguasa. Tugu megah setinggi 15 meter tersebut dianggap secara semena-mena menginjak wilayah batin warga dan merusak keselarasan arsitektur lingkungan. Kebijakan sentralisasi oleh pemerintah RI menyebabkan pola pembangunan kota di Indonesia umumnya menginduk pada pembangunan di Jakarta. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya kontrasitas sosial (benturan sosial akibat kondisi yang berbeda) yang menyebabkan Kota Surakarta rentan terhadap konflik sosial.

Secara fisik, perkembangan Kota Surakarta selanjutnya menunjukkan pola dan bentuk *grid* pada masa kolonial masih dipertahankan pada periode ini. Di daerah pinggiran kota, pola *grid* yang ada kurang tegas dan kurang teratur. Hal ini disebabkan perkembangan kota yang cenderung spontan dan kurang terencana (Pemda Surakarta, 1974). Perpaduan antara bentuk kota masa kerajaan dan masa kolonial dapat dirasakan dan diamati pada periode ini. Kraton Kasunanan dan Mangkunegara masih menjadi pusat aktivitas dan orientasi lingkungan lain, namun daerah pusat aktivitas kota cenderung bertambah banyak dan menyebar mengikuti arah perkembangan penduduk. Selain itu pola peruntukan wilayah juga mengalami perubahan. Pada periode ini pemerintah hanya terfokus pada pembangunan yang bersifat kapitalisme dan komersil, sehingga lahan-lahan pertanian yang berada di kawasan industri. Di pusat kota mulai tumbuh pemukiman-pemukiman baru.

Dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi dimana daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat melalui prakarsanya sendiri (UU No. 22 Tahun 1999), pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan visi yaitu "Terwujudnya Kota Surakarta sebagai Kota Budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa dan pendidikan, pariwisata dan olahraga". Berdasarkan visi tersebut, maka perkembangan kota Surakarta diharapkan dapat menemukan kembali identitas atau karakter yang dimiliki dan melekat dalam kehidupan masyarakat selama dua abad (1745-1945), sehingga tidak ada kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalkan. Sedangkan analisis dan konsep tata ruang lanskap Kota Surakarta dari periode ke periode secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.

Faktor Penentu Perubahan Lanskap Kota Surakarta

Hasil analisis yang dilakukan terhadap perkembangan Kota Surakarta diketahui bahwa Kota Surakarta telah berkembang menuju perkembangan yang semakin di luar kontrol warganya. Kota telah terkendali oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi yang bersifat global dan nasional yang jauh di luar jangkauan warga kota. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh bahwa terdapat beberapa faktor yang menentukan perubahan tata ruang kota. *Pertama*, nilai-nilai, norma dan kepercayaan yang berlaku pada masyarakat sehingga mempengaruhi dan membentuk pola, sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal penataan ruang kota. *Kedua*, kebijakan penguasa/pemerintah pada tiap-tiap periode perkembangan. Ketiga, kalangan pengusaha. Kalangan pengusaha dengan modal yang dimiliki mampu merubah tatanan dan perkembangan tata ruang kota. Dari hasil analisis tersebut, terdapat tiga faktor atau komponen dari struktur sosial perkotaan yang membentuk rona atau wajah kota serta menentukan kapasitas kota menghadapi perubahan tersebut yaitu: masyarakat (*community*), pemerintah (penguasa/*state*) dan pengusaha (*economy*).

Lemahnya kemampuan dan kerjasama tiga komponen ini akan melemahkan kapasitas sistem sosial kota dalam menghadapi perubahan sehingga perkembangan kota tidak akan mampu mengakomodir kepentingan serta karakteristik masyarakatnya. Hubungan antara ketiga komponen struktur sosial masyarakat Kota Surakarta terhadap bentuk dan tata ruang kota dapat dilihat pada Gambar 4.

Dari hasil analisis terhadap faktor yang mempengaruhi perkembangan kota, maka dapat diperoleh suatu keterkaitan antara perkembangan kota sebagai akibat pengaruh perubahan kondisi sosial. Penguasaan dan penggunaan terhadap suatu lahan tidak terlepas dari pengaruh kebijakan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah saat itu. Sedangkan di satu sisi, dengan adanya penguasa dan kebijakan yang berbeda pada tiap periode memberikan pengaruh terhadap perbedaan kondisi sosial masyarakat pada tiap periodenya. Sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa penguasa dan kebijakannya merupakan faktor utama perubahan lanskap Kota Surakarta.

Revitalisasi Lanskap Sejarah dan Budaya sebagai Pertimbangan dalam Perencanaan dan Pembangunan Kota Surakarta

Dalam upaya penjabaran strategi pembangunan berwawasan identitas, salah satu aspek yang sering terlupekan adalah konservasi bangunan kuno bersejarah. Perhatian lebih banyak ditekankan pada pembangunan baru yang lebih mengesankan sebagai cerminan modernitas. Akibatnya, banyak bangunan kuno bersejarah yang dibongkar atau digusur dengan alasan lahannya diperlukan untuk pembangunan fasilitas baru. Padahal dengan hilangnya bangunan kuno tersebut maka hilang pulalah bagian dari sejarah kota yang sebenarnya telah menciptakan suatu identitas tersendiri bagi kota. Oleh karena itu, timbul erosi identitas budaya, dengan hilangnya bangunan kuno bersejarah yang merupakan warisan berharga dari nenek moyang. Kesenambungan masa lampau-masa kini-masa depan yang mengejawahtah dalam karya-karya

arsitektur, merupakan kunci dalam penciptaan rasa harga diri, percaya diri dan jati diri atau identitas. Keberadaan bangunan kuno bersejarah tersebut mencerminkan kisah sejarah, tatacara hidup, budaya dan peradaban masyarakatnya.

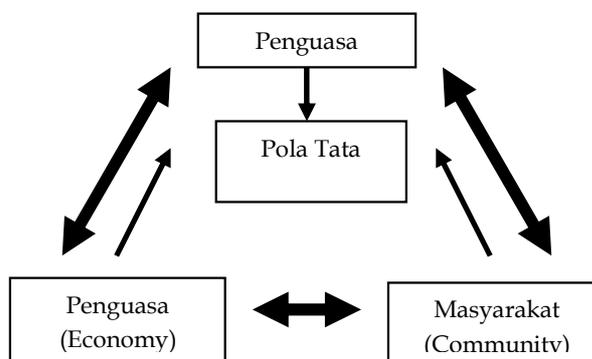
Beberapa hal yang merupakan dasar pentingnya rekonstruksi dan revitalisasi bangunan kuno bersejarah sebagai pertimbangan dalam perencanaan dan pembangunan kota adalah:

1. Lingkungan dan bangunan kuno bersejarah dengan ragam arsitekturnya yang khas merupakan aset yang sangat berharga dalam bidang pariwisata
2. Peninggalan karya arsitektur kuno, baik tradisional maupun peninggalan kolonial, merupakan rekaman sejarah dalam bentuk visual yang menyiratkan kesinambungan peri kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu
3. Pada masa-masa yang penuh perubahan cepat, lingkungan dan bangunan kuno bersejarah memberikan suasana tersendiri yang

unik, segar, akrab serta dapat menjadi "tenggeran" atau *land-mark* untuk orientasi.

4. Generasi mendatang membutuhkan rasa aman dan kebanggaan, yang akan diperoleh melalui peluang untuk melihat, menyentuh dan merasakan bukti fisik sejarah serta kekayaan budaya nenek moyang
5. Dengan dilestarikannya bangunan kuno bersejarah di segenap tempat, khasanah wajah lingkungan akan menjadi lebih kaya
6. Keberhasilan perencanaan dan perancangan lingkungan binaan di masa lampau, akan merupakan bekal dan pelajaran berharga bagi kegiatan serupa di masa depan

Bila ditarik ke belakang, peran sejarah Kota Surakarta sejak jaman pra kerajaan hingga jaman kemerdekaan tidak dapat diabaikan, dan kesemuanya terwujud dalam banyaknya peninggalan bersejarah di Kota Surakarta. Hasil identifikasi dan analisis terhadap bangunan-bangunan kuno



Gambar 4. Pola Hubungan Struktur Sosial terhadap Bentuk Lanskap Kota Surakarta

Tabel 2. Perubahan Tata Ruang Kota Surakarta

| No | Periode Tata Ruang | Bentuk/ Pola | Orientasi | Landuse |
|----|------------------------------------|------------------------------|---|---|
| 1 | Pra-Kerajaan | Linier | Rumah Ki Gede Sala, Bengawar Solo, Pasar | Pertanian, perdagangan, pemukiman |
| 2 | Kasunanan Surakarta Hadiningrat | Linier | Lingkungan Kraton dan Mangkunegara | Pertanian, perdagangan, pemukiman, pertahanan, pemerintahan |
| 3 | Pemerintah Kolonial Belanda | Rectalinier atau grid | Kompleks kraton, Mangkunegaran, Benteng Vastenbergh dan Gubernuran | Perkebunan, perdagangan, industri, pemukiman, pertahanan, pemerintahan |
| 4 | Kemerdekaan RI (1945-1965) | Rectalinier, radiocentris | Kompleks kraton, Mangkunegaran, balaikota, Pasar Gede, kampung Baru | Industri, perkantoran, Perdagangan, Pemukiman, Pertahanan, pemerintahan |
| 5 | Orde Baru (1966-1998) | Rectalinier, kompleks | Kompleks kraton, Mangkunegaran, balaikota, Pasar Gede, kampung Baru | Industri, perkantoran, Perdagangan, Pemukiman, Pertahanan, pemerintahan |
| 6 | Reformasi (1999-sekarang) | Rectalinier, kompleks | Kompleks kraton, Mangkunegaran, balaikota, Pasar Gede, kampung Baru | Industri, perkantoran, Perdagangan, Pemukiman, Pertahanan, pemerintahan |

yang memiliki nilai sejarah tinggi yang sampai saat ini masih dijumpai di Kota Surakarta beserta kondisinya saat ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan bab sebelumnya, terlihat kecenderungan yang kuat bahwa perencanaan tata ruang kota lebih berat ditekankan pada aspek penataan ruang kota dalam arti fisik dan visual dari pada aspek komunitas (sosial-budaya). Kota merupakan penjejawantahan budaya (*cultural landscape*), sebagai mosaik yang sarat dengan beraneka ragam karakter, sifat, kekhasan, keunikan dan kepribadian. Oleh karena yang pertama-tama harus dipahami adalah budaya masyarakat dan pengaruh tata nilai, norma, gaya hidup, kegiatan dan simbol-simbol yang dianut terhadap penataan dan bentuk kota.

Dalam konteks ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk perencanaan dan penataan kota kedepan. *Pertama*, kepekaan terhadap warisan peninggalan kuno. Tergusur dan hilangnya suatu karya arsitektur langka yang estetis dan bernilai sejarah, berarti hilang pula suatu babakan dari kisah perkembangan kota. Revitalisasi kawasan bersejarah merupakan upaya yang perlu digalakkan. Dalam kaitannya tersebut, dapat digunakan Teori *Linkage* dalam perencanaan, penataan dan perancangan kota untuk mengetahui perkembangan kota serta uraian sejarah kota (Budihardjo, 1999). Terdapat beberapa *linkage area* di Kota Surakarta yang menjadi motor penggerak aktivitas kota dan perlu dibenahi untuk menciptakan karakter Kota Surakarta.

1. *Linkage Integrated Area Pusat Kota*

Kawasan yang tercakup didalamnya adalah Kraton Surakarta, Pura Mangkunegaran dan Balaikota-Pasar Gede serta Benteng Vastenberg sebagai kawasan perdagangan dan pemerintahan. Melihat perkembangan Kota Surakarta, pada kawasan ini sering terjadi perbenturan nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai yang timbul kemudian. Untuk itu, pada kawasan ini perlu didisain sebuah kawasan perdagangan yang tetap mengacu kepada kedudukan kraton dan Mangkunegaran. Sesuai dengan

konsep *mancapat*, kawasan inti kraton (istana, alun-alun, masjid dan pasar) dan Mangkunegaran harus "steril" dari kegiatan perdagangan. Pusat-pusat pertokoan dan pedagang kaki lima (PKL) tidak berada di sekitar kawasan kraton ataupun alun-alun, karena jika mengacu konsep *mancapat* telah dibangun Pasar Gede di luar kraton. Sedangkan di sepanjang jalan utama yang diperuntukkan sebagai perkantoran, pertokoan dan jasa pelayanan, dapat dibuat dengan disain bangunan ataupun elemen-elemennya serta *street furniture* yang mengacu pada arsitektur tradisional, sehingga terdapat kesatuan ruang. Dari hasil perencanaan kawasan ini, dapat dikembangkan kegiatan wisata budaya yang dipadukan dengan wisata belanja. Bangunan Benteng Vastenberg yang berada di sebelah utara kraton, perlu dikonservasi, dipreservasi dan direvitalisasi sebagai benda cagar budaya. Dengan tetap mempertahankan disain bangunannya, benteng ini dapat digunakan lagi dengan fungsi baru, seperti museum.

2. *Linkage Integrated Area Open Space*

Kawasan yang tercakup didalamnya adalah Taman Sriwedari, Taman Balekambang dan Taman Jurug. Ketiga kawasan ini merupakan bagian dari sejarah perkembangan Kota Su-

rakarta dimana fungsinya adalah sebagai ruang terbuka publik dan sarana rekreasi bagi warga kota. Selain berfungsi sebagai sarana rekreasi dan hiburan, dapat pula sebagai kegiatan industri wisata seperti pameran pembangunan serta kegiatan promosi wisata dan kebudayaan yang menarik pengunjung. Dalam perencanaan kawasan ini, dapat dihadirkan elemen-elemen lanskap baik elemen keras (pedestrian, plaza, jalan, pagar, gedung kesenian dan lainnya) ataupun elemen lunak (vegetasi dan air) ber-nuansa masa lalu. Sehingga warga kota ataupun pengunjung dapat merasakan dan membayangkan bagaimana bentuk kota tradisional pada masa lampau. Dari hasil perencanaan tersebut, kawasan ini dapat dikembangkan sebagai wisata budaya dan pendidikan, kegiatan olahraga serta kegiatan perdagangan.

Kedua, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup (*participatory planning*). Pada kebanyakan perencanaan kota dan lingkungan masyarakat acap kali hanya dilihat sebagai konsumen yang pasif. Dalam rangka otonomi daerah yang tercantum dalam UU No.22 Tahun 1999 Pasal 92 Ayat (1) dan (2) bahwa penyelenggaraan kawasan perkotaan, Pemerintah dae-

Tabel 3. Bangunan Bersejarah di Kota Surakarta Saat ini

| No | Bangunan Bersejarah | Tahun | Keterangan |
|----|-------------------------|-------|---|
| 1 | Kraton Surakarta | 1745 | Merupakan cikal bakal pembentukan Kota Surakarta dengan ciri arsitektur tradisional Jawa. Kraton saat ini hanya merupakan salah satu situs bersejarah seperti layaknya candi |
| 2 | Benteng Vastenberg | 1745 | Berfungsi sebagai titik pertahanan kolonial di Jawa Tengah. Kondisinya saat ini menyerupai puing-puing, beberapa bagian atap di bangunan utama sudah tidak bergenting serta perdu liar yang lebat di sekitar bangunan |
| 3 | Pura Mangkunegara | 1757 | Menggambarkan percampuran antara arsitektur tradisional dan arsitektur barat |
| 4 | Masjid Agung | 1777 | Dibangun dengan arsitektur tradisional Jawa. Kondisi saat ini masih cukup terawat, namun di sekitar bangunan modern dan bersifat komersial |
| 5 | Stasiun Balapan | - | Merupakan bangunan gaya kolonial yang berfungsi sebagai stasiun kereta api namun kondisinya kurang terawat |
| 6 | Stasiun Purwosari | 1875 | Sebagai pendukung gaya kolonial yang berfungsi sebagai stasiun kereta api namun kondisinya kurang terawat |
| 7 | Loji Gandrung | - | Saat unu digunakan sebagai rumah dinas Walikota Surakarta dan masih utuh kondisinya |
| 8 | Vihara Avalokiteswaru | - | Menggunakan arsitektur Cina. Kondisi cukup terawat dan masih berfungsi sebagai tempat ibadah agama Budha |
| 9 | Vihara Po-An-Kiong | 1881 | Bangunan berarsitektur dan berornamen Cina. Kondisi saat ini cukup terawat |
| 10 | Pasar Gede Hardjonagoro | 1893 | Dapat berfungsi sebagai landmark kota. Pada tahun 1927 pernah dilakukan perbaikan. Kondisi saat ini cukup baik |
| 11 | Taman Sriwedari | 1899 | Taman ini telah mengalami perubahan sebagai taman yang memiliki unsur budaya menjadi kawasan bernilai ekonomi dan wisata |
| 12 | Stasiun Jebres | 1900 | Bangunan bergaya kolonial dan belum pernah ditambah/dikurangi meskipun saat ini telah berkembang sebagai stasiun peti kemas |
| 13 | Gereja St. Antonius | 1905 | Bangunan gaya arsitektur barat dan belum pernah mengalami perubahan bentuk maupun fungsinya |
| 14 | Javache bank | 1908 | Kantor bank pertama kali di Surakartadengan arsitektur kolonial. Sekarang menjadi gedung Bank Indonesia, kondisinya baik |
| 15 | Taman Balekambang | 1916 | Sebagai bekas taman pada pemerintahan Mangkunegara. Kondisi kawasan ini tidak terawat dan sangat kumuh |

rah perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta. Pengikutsertaan masyarakat tersebut merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kota. *Ketiga*, peningkatan wibawa dan kekuatan hukum suatu produk rencana tata ruang kota (*law enforcement*). Dengan dilaksanakannya ketiga hal tersebut diharapkan Kota Surakarta dapat kembali menemukan identitas dan karakter kota tanpa mengabaikan karakteristik masyarakat kotanya. Sehingga dalam pengembangannya tidak menimbulkan ketimpangan yang dapat berujung pada konflik dan kerusuhan massal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Terdapat tiga komponen pembentuk struktur sosial yang mempengaruhi perkembangan kota yaitu masyarakat (*Community*), penguasa (*State*) dan pengusaha (*Economy*). Ketiga faktor tersebut membentuk struktur sosial masyarakat yang berbeda pada masing-masing periode perkembangan. Penguasa dengan kebijakan-

kebijakan yang dikeluarkannya, pengusaha dengan kekuatan uang dan modal yang dimiliki dapat sangat berpengaruh terhadap pembentukan wajah kota. Sedangkan masyarakat atau komunitas, dengan kebudayaan dan kepercayaan yang berlaku dapat pula mempengaruhi pola penggunaan lahan dan rona lanskap kota. Lemahnya kemampuan dan kerjasama tiga komponen ini akan melemahkan kapasitas sistem sosial kota dalam menghadapi perubahan sehingga perkembangan kota tidak akan mampu mengakomodir kepentingan serta karakteristik masyarakatnya.

Saran

Penelitian ini hanya melihat suatu perkembangan kota dari aspek sosial, oleh karena itu perlu dilakukan kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan kota ditinjau dari aspek-aspek yang lain, sehingga dapat dihasilkan suatu *platform* atau "model" yang mampu menjadi acuan dalam konsep perencanaan, penataan dan pembangunan kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Surakarta. 1995. Inventarisasi Bangunan dan Kawasan Kuno Bersejarah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. Bappeda. Surakarta.
- Budihardjo, E dan Djoko Sutarto. 1999. Kota Berkelanjutan. Penerbit Alumni. Bandung.
- Carpenter, P. L., T. D. Walker dan F. O. Lanphear. 1975. *Plants in The Landscape*. W. H. Freeman Co. San Fransisco.
- Kuntowijoyo. 2000. *The Making of A Modern Urban Ecology: Social and Economic History of Solo 1900-1915*. Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. (tidak dipublikasikan).
- Sajid, R. M. 1984. Babad Sa1a. Rekso Pustoko Mangkunegaran. Surakarta.